



**KONSPIRASI POLITIK DALAM KEMATIAN
MARSINAH DI PORONG SIDOARJO
TAHUN 1993-1995**

SKRIPSI

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (SI) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh :

**IYUT QURNIASARI
NIM. 100110301024**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2014**

MOTTO

“Politik Kekerasan” dengan segenap variasi dan tali-temalnya mustahil mampu menghadapi arus tuntutan ekonomi dan politik buruh yang tidak semata-mata berangkat dari “persoalan perut”.

(Mulyana W. Kusumah)

“Negara yang memakai pola penculikan merupakan negara yang kepemimpinannya memakai pola diktator dan fasisme. Setiap diktator punya pasukan khusus untuk menculik”

(Andi Arief)

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta Siti Romlah dan ayahanda tercinta Marsad Hadi yang telah sepenuh hati memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan do'a yang tulus dan ikhlas kepada penulis dari kecil hingga sekarang,
2. Kedua adik penulis, Asbul Hadi Bahroni dan Novika Diharjo tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan,
3. Mbah Tamyis (Mbah Kakung), Mbah Atimah (Mbah Puteri), alm. Mbah Sejo, almh. Mbah Sunami yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a,
4. Keluarga besar penulis diantaranya, Pakde Abdullah sekeluarga, alm. Slamet Susanto sekeluarga, almh. Tantin Yuliasini sekeluarga, Bunali sekeluarga dan alm. Matohir sekeluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat,
5. Sivfian Hendra Legowo yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan,
6. Almamater tercinta,
7. Almh. Marsinah yang telah gugur dalam perjuangannya melawan ketidakadilan kaum buruh, semoga perjuangannya tidak sia-sia dan semangatnya mewarisi semangat perjuangan buruh-buruh lain untuk melawan ketidakadilan,
8. Keluarga Marsinah,

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyut Qurniasari

NIM : 100110301024

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *Konspirasi Politik Dalam Kematian Marsinah Di Porong Sidoardo Tahun 1993-1995* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan ke instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya sebagai penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2014

Yang menyatakan,

Iyut Qurniasari

NIM. 100110301024

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing,

Drs. IG. Krisnadi, M.Hum.

NIP. 196202281989021001

PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 September 2014

Ketua,

Drs. IG. Krisnadi, M.Hum.

NIP. 196202281989021001

Anggota 1,

Anggota 2,

Dr. Retno Winarni, M. Hum.

NIP. 195906281987022001

Sunarlan, S.S., M.Si.

NIP. 196910112006041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini mengkaji tentang sejarah perburuhan pada masa Orde Baru dengan judul *Konspirasi Politik Dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995*. Permasalahan perburuhan pada masa Orde Baru sangatlah kompleks, khususnya peristiwa kematian Marsinah yang mengandung konspirasi tingkat tinggi, sehingga kematiannya tidak pernah terungkap sampai sekarang.

Kematian Marsinah yang masih menyisakan banyak misteri, membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi tema skripsi, yang lebih spesifik menyoroti tentang konspirasi politik di dalam proses kematian Marsinah hingga proses pengungkapannya. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Secara langsung penulis mengakui bahwa penyusunan sampai selesai karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. IG. Krisnadi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember dan dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan rela meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya hingga skripsi ini selesai,
3. Alm. Drs. Hendro Sumartono yang memberikan banyak pengetahuan dan arahan khususnya terkait tema dan judul skripsi yang disusun oleh penulis,
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sastra khususnya Jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah,
5. Lembaga Penelitian Universitas Jember dan Lembaga Perpustakaan Universitas Jember beserta para kerjanya yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh sumber,

6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember,
7. Kawan-kawan GmnI Komisariat Sastra Cabang Jember yang telah memberikan ilmu berorganisasi dan pengalaman yang berharga kepada penulis,
8. Kawan-kawan Jurusan Sejarah Angkatan 2010 yang telah banyak memberikan semangat, bantuan, informasi dan pengalamannya selama ini,
9. Kawan-kawan kos Jl. Jawa IV B No.06 yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat,
10. Mbak Nur Fitriah Hariyani dan Mbak Nurul Ibri Lusiyanti yang banyak memberikan semangat dan perhatian kepada penulis,
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan berdiskusi dan menambahkan referensi buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 3 September 2014

Iyut Qurniasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
RINGKASAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat	9
1.3.1. Tujuan	9
1.3.2. Manfaat	10
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.6. Pendekatan dan Kerangka Teori	14
1.7. Metode Penelitian	19
1.8. Sistematika Penulisan	21

BAB 2 Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Gerakan Buruh di Indonesia	23
2.1. Model Negara Otoriter Birokratik (OB) Orde Baru	24
2.2. SPSI sebagai Serikat Buruh Tunggal Orde Baru	27
2.3. Penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Sebagai Konsep Pemangkas Gerakan Buruh	37
2.4. Peran Militer dalam Penyelesaian Masalah Perburuhan	43
2.5. Profil PT. Catur Putra Surya Porong Sidoarjo	53
BAB 3 Pengungkapan Kasus Kematian Marsinah	57
3.1. Peran Marsinah dalam Pemogokan Buruh PT. CPS Porong Sidoarjo	58
3.2. Gerakan Awal Pengungkapan Kasus Kematian Marsinah	68
3.3. Kejanggalan Dalam Proses Peradilan Kasus Kematian Marsinah	77
3.4. Dampak Kematian Marsinah Terhadap Gerakan Buruh di Indonesia	93
BAB 4 Penutup	104
4.1. Kesimpulan	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD-ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
AFL-CIO	: American Federation of Labour-Congress of Industrial Organizations
ASTEK	: Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Bakin	: Badan Koordinasi Intelijen
Ba TUUD Ramil	: Bintara Ahli Tata Usaha Urusan Dalam Rayon Militer
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
FES	: Frederich Ebert Stiftung
Golkar	: Golongan Karya
GSP	: Generalized System Preferences
HIP	: Hubungan Industrial Pancasila
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
ICFTU	: International Confederation of Free Trade Union
ILO	: International Labour Organization
Jamsostek	: Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KFM	: Kebutuhan Fisik Minimum
KKB	: Kesepakatan Kerja Bersama
Kadin	: Kamar Dagang Industri
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kopkamtib	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Koramil	: Komando Rayon Militer

Korem	: Komando Resort Militer
KSUM	: Komite Solidaritas untuk Marsinah
Muspika	: Musyawarah Pimpinan Kota
P4D	: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
P4P	: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Pasi	: Kepala Seksi
PBP	: Perkumpulan Bumiputera Pabean
PEB	: Politiek Economische Bond
PFB	: Personeel Fabriek Bond
PGB	: Perkumpulan Guru Bantu
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PPPB	: Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera
PUK	: Pengurus Unit Kerja
Puspi	: Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia, Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia, Perhimpunan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia.
Rapim	: Rapat Pimpinan
SBLP	: Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan
SBSI	: Serikat Buruh Seluruh Indonesia
Sisbikum	: Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
THR	: Tunjangan Hari Raya
UU PMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
UU PMDN	: Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
VSTP	: Vereniging v. Spoor en Tram Personeel

YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
YTKI : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia
VR : Visum et Repertum
WCL : World Confederation of Labour

DAFTAR ISTILAH

Bipartite :

Wadah untuk mengeratkan hubungan antara buruh dan pengusaha yang didirikan di setiap perusahaan, serta menjadi forum untuk mengadakan dialog, konsultasi, perundingan dan sekaligus partisipasi dalam memecahkan masalah bersama dan perbedaan kepentingan bersama.

Dwifungsi ABRI :

Tugas angkatan bersenjata tidak hanya mempertahankan negeri, tetapi juga memainkan peran aktif dalam urusan sosial politik.

Industrialisasi :

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan menggalakkan berbagai jenis industri dalam suatu negara.

Intimidasi :

Perbuatan atau tindakan menakut-nakuti dengan kata-kata ancaman untuk menjatuhkan moral atau semangat pada seseorang.

Konspirasi :

Komplotan

Pembangunanisme :

Ideologi yang memberikan prioritas pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi, bukannya kebebasan politik dan hak asasi manusia, serta membenarkan otoritarianisme sebagai harga yang harus dibayar demi pembangunan ekonomi.

Praperadilan :

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang: Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan

demi tegaknya hukum dan keadilan, sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Provokator :

Orang yang bertugas melakukan tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan kemarahan orang (kelompok orang) sehingga bisa menimbulkan huru-hara atau kerusuhan.

Top Down :

Penerapan rancangan dan implementasi program-program pembangunan pemerintah Orde Baru, dimana semua berasal dari atas atau negara.

Trilogi Pembangunan :

Konsep dasar pembangunan Orde Baru, yaitu (1) pemerataan pembangunan, (2) pertumbuhan ekonomi tinggi, (3) stabilitas nasional

Tripartite :

Wadah untuk mengeratkan hubungan antara buruh, pengusaha dan pemerintah yang didirikan di tingkat pusat sampai daerah, serta menjadi forum untuk mengadakan dialog, konsultasi, perundingan dan sekaligus partisipasi dalam memecahkan masalah bersama dan perbedaan kepentingan bersama.

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Daftar Nama-Nama Yang Diduga Terlibat Dalam Kematian Marsinah	73
Table 3.2	Hasil Visum et Repertum (VR) Awal Dari RSUD Nganjuk	88
Table 3.3	Hasil Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Kepada Para Terdakwa	91

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Foto PT. CPS Porong Sidoarjo	54
Gambar 2	Foto Gubuk Tani Tempat Mayat Marsinah Ditemukan	69
Gambar 3	Foto Tugu Kuning	71
Gambar 4	Buruh PT. CPS Porong Memperingati Satu Tahun Kematian Marsinah	95
Gambar 5	Foto Buruh Memperingati Perjuangan Marsinah	101
Gambar 6	Rombongan Obor Marsinah di Makam Marsinah	102
Gambar 7	Rombongan Obor Marsinah di Makam Marsinah	103

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	12 Tuntutan Buruh PT. CPS Porong Dan Hasil Negosiasi Pada 5 Mei 1993	117
Lampiran B	Laporan Penemuan Mayat Marsinah	119
Lampiran C	Surat Putusan Mahkamah Agung (MA) Kepada Yudi Astono	124
Lampiran D	Surat Pencekalan Terhadap Yudi Susanto	138
Lampiran E	Surat Pembatalan Pelaksanaan Pameran Seni Rupa Untuk Marsinah	139
Lampiran F	Surat Penyitaan Kaset Lagu Berjudul "Marsinah"	140
Lampiran G	Wawancara	141
Lampiran H	Media Massa Yang Mengabarkan Kasus Marsinah	151

ABSTRAK

Skripsi yang dibangun dengan menggunakan data primer dan sekunder ini membahas tentang konspirasi politik dalam kematian Marsinah yang terjadi pada tahun 1993-1995 di Porong Sidoarjo. Cakupan pembahasan meliputi kebijakan pemerintah Orde Baru pada dunia perburuhan yang bertujuan untuk mengontrol buruh agar selalu mendukung pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang merupakan satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah, penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) sebagai konsep pemangkas gerakan buruh dan intervensi militer dalam setiap masalah perburuhan. Cakupan pembahasan yang lebih fokus dalam skripsi ini adalah memaparkan kasus kematian Marsinah dan proses pengungkapannya yang penuh dengan konspirasi. Dampak dari kematian Marsinah sangat besar terhadap gerakan buruh di Indonesia, kematian Marsinah tidak menyurutkan semangat buruh yang lain untuk melawan ketidakadilan, oleh karenanya jumlah pemogokan buruh di Indonesia semakin meningkat. Terkait dengan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Kata Kunci : Marsinah, Buruh, Konspirasi Politik, Orde Baru.

ABSTRACT

This thesis that uses primary and secondary data describes about political conspiracy on the death of Marsinah in Porong Sidoarjo in 1993-1995. The scope of the discussion includes the Orde Baru government policy of labor that aims to control the labor in order to support national development. The policies include the forming of Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) that is the only legal labor alliance from the government, the implementation of Hubungan Industrial Pancasila (HIP) as a concept of pemangkas gerakan buruh dan intervensi militer dalam setiap masalah perburuhan. The focus of this thesis describes the case of the death of Marsinah and the process in revealing the fact which has many conspiracies. The effect of the death of Marsinah on gerakan buruh in Indonesia is great, the death of Marsinah cannot decrease the spirit of others in against unfairness, that is why the amount of labor strike in Indonesia is increase. The research method that is used in this thesis is historical method which has four steps those are heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Keywords: Marsinah, Political Conspiracy, New Orde

RINGKASAN

KONSPIRASI POLITIK DALAM KEMATIAN MARSINAH DI PORONG SIDOARJO TAHUN 1993-1995, Iyut Qurniasari, 100110301024; 2014; 158 halaman; Sejarah, Sastra, Universitas Jember.

Kebijakan perburuhan pada masa Orde Baru ditata sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu pembangunan nasional disertai pemerataan dengan mengedepankan stabilitas nasional. Akan tetapi yang terealisasi hanya pembangunan ekonomi dan perwujudan stabilitas nasional sehingga masyarakat secara luas tidak dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Buruh sebagai salah satu pihak yang ikut menunjang pembangunan selalu diarahkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mendukung kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan meskipun secara implisit melanggar hak-hak dasar mereka sebagai buruh. Lambat laun buruh semakin sadar dengan ketidakadilan yang mereka alami, kaum buruh juga semakin berani mengeluarkan pendapatnya untuk menuntut hak-hak mereka. Salah satu buruh yang berani untuk menuntut hak-hak dasarnya adalah Marsinah.

Marsinah merupakan seorang buruh perempuan yang bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong Sidoarjo, ia berani menuntut kenaikan upah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50/1992 yang tidak direalisasikan oleh pihak pabrik. Tuntutan Marsinah dan kawan-kawannya tidak hanya menaikkan upah, akan tetapi juga menuntut beberapa hak-hak normatif buruh seperti upah lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), cuti haid, cuti hamil, dan lain-lain. Marsinah menjadi buruh yang sangat gigih memperjuangkan tuntutan-tuntutan tersebut hingga pada 9 Mei 1993 ia ditemukan meninggal dunia di Dusun Jegong Wilangan Nganjuk dalam keadaan yang tragis. Kematian Marsinah tentu berhubungan dengan sikap vokalnya dalam demonstrasi pada 3-4 Mei 1993. Setelah kematian Marsinah, proses penanganan kasusnya banyak dinilai menyalahi aturan hukum yang berlaku oleh para ahli. Yudi Susanto (pemilik PT. CPS Porong) dan delapan karyawannya yang ditangkap pada 1 Oktober 1993 dituduh sebagai orang yang melakukan perencanaan pembunuhan terhadap

Marsinah. Persidangan mereka digelar secara bergantian di Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Marsinah dan mendapatkan vonis penjara. Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya juga tetap menyatakan mereka bersalah, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum yang tidak terima atas putusan kepada Yudi Susanto kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), permohonan kasasi juga diajukan oleh delapan terdakwa lainnya. Pada 3 Mei 1995 secara mengejutkan MA menyatakan bahwa kesembilan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Marsinah.

Pengorbanan Marsinah dalam memperjuangkan ketidakadilan sebagai seorang buruh membuatnya mendapat berbagai penghargaan, meliputi Yap Thaim Hien Award (penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang yang memperjuangkan HAM), penghargaan sebagai Srikandi Pekerja Indonesia oleh Dewan Pimpinan Pusat SPSI dan sebagai warga teladan Kabupaten Nganjuk. Kematian Marsinah juga berimbas positif terhadap gerakan buruh di Indonesia terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk melawan ketidakadilan dengan resiko apapun. Akan tetapi walaupun kaum buruh semakin berani untuk melawan, pemerintah Orde Baru juga semakin ketat mengawasi buruh yaitu dengan membuat kebijakan baru yang lebih menekan, melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh buruh yang vokal, melakukan pencekalan-pencekalan terhadap pementasan teater buruh apalagi yang menampilkan perjuangan Marsinah. Nama Marsinah kemudian menjadi icon perjuangan buruh di Indonesia.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menekan buruh agar tetap mengedepankan stabilitas nasional demi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dari kebijakan-kebijakan tersebut muncul sosok Marsinah yang berani melawan dan berjuang menuntut hak yang seharusnya didapat oleh kaum buruh. Dengan demikian dapat diketahui bahwa buruh yang vokal dan berani seperti Marsinah harus 'didiamkan' untuk menjaga stabilitas nasional meskipun cara men'diamkannya' dengan cara membunuhnya. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah untuk

memperkaya penulisan sejarah perburuhan, khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada pembaca dan penulis terkait dengan pengungkapan kasus Marsinah yang tidak mendapat kejelasan karena adanya konspirasi untuk menjauhkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Marsinah dari jeratan hukum. Terkait dengan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.